

Kabupaten Bogor Izinkan 3 Tempat Wisata Buka

CIBINONG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat baru membolehkan tiga tempat wisata di wilayahnya untuk beroperasi pada Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM.

“Sudah ada tiga (tempat wisata) yang keluar rekomendasinya, itu pun hanya wisata konservasinya yang dibolehkan buka, wahana lainnya belum boleh,” ungkap Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor, Titi Sugiarti di Cibinong, Bogor, Rabu malam (22/9).

Tiga tempat wisata konservasi wisata dan tumbuhan tersebut yaitu Taman Safari Indonesia (TSI) di Cisarua, Taman Buah Mekarsari di Cileungsi, dan Jungle Land di Babakan Madang. Namun, Pemkab Bogor menetapkan sejumlah persyaratan selama PPKM, yakni menerima pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas, tutup pukul 17.00 WIB, dan wajib mengu-

nakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pengunjung dan pegawai.

Sejumlah aturan mengenai operasional wisata konservasi hewan dan tumbuhan tersebut tercantum dalam Keputusan Bupati Bogor nomor 443/424/Kpts/Per-UU/2021 tentang perpanjangan keempat PPKM Level 3, berlaku pada 21 September-4 Oktober 2021.

Kepub tersebut juga mengatur bahwa wisata alam, desa wisata beserta fasilitas penunjangnya ditutup sementara. Kemudian wahana permainan dalam ruangan dan luar ruangan pun ditutup sementara.

Kemudian, Kabupaten Bogor juga menetapkan tempat penginapan diperbolehkan buka dengan syarat menerima pengunjung paling banyak 50 persen dari kapasitas tempat, dan menerapkan protokol kesehatan dengan menunjukkan antigen negatif hasil pemeriksaan paling lama H-1. ● **gio**

PERPANJANGAN PPKM LEVEL 3

Ade Yasin: Pegawai Masuk Kantor Pemkab Wajib Gunakan Aplikasi Peduli Lindungi

CIBINONG (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin mewajibkan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, memiliki aplikasi PeduliLindungi syarat untuk bisa ber Kantor.

“Bagi pegawai yang sudah divaksin, wajib meng download aplikasi PeduliLindungi pada saat mau masuk dan keluar kerja,” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, Kamis (23/9). Orang nomor satu di jajaran Pemkab Bogor ini mengungkapkan kebijakan baru ini akan dilakukan seiring perpanjangan PPKM Level 3 sampai 4 Oktober 2021.

“Langkah ini diambil sebagai mencegah penyebaran Covid-19, agar sektor tersebut dapat terus berjalan. Sektor ini mulai bisa Work From Office (WFO) maksimal 25 persen selama PPKM berlaku,” ungkapnya.

Ade Yasin menambahkan beberapa sektor non esensial yang kembali diizinkan beroperasi yakni hotel, restoran, pusat kebugaran atau gym, ruang pertemuan atau ballroom dan kafe. “Kapasitas

maksimal 50 persen dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dan kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk,” benarnya.

Selain itu Pemkab Bogor juga mewajibkan para orang tua yang memiliki anak di bawah 12 tahun untuk melakukan skrining.

“Untuk anak ini, wajib menunjukkan hasil negatif antigen (H-1) atau PCR (H-2),” tuturnya. Sedangkan untuk gym dan ruang pertemuan, Pemkab Bogor hanya memperbolehkan pengunjung maksimal 50 persen dengan kategori hijau dan kuning dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk.

Untuk kafe jam operasional mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 00.00 WIB, dengan kapasitas maksimal 25 persen. Beroperasi dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat. Setiap meja hanya dua orang, waktu makan maksimal 60 menit dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai. ● **gio**

IDN/ANTARA



HARGA TELUR AYAM TURUN

Pekerja mengambil telur ayam di Desa Sindangrasa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021). Akibat harga jual telur yang terus mengalami penurunan menjadi Rp 15.500 per kilogram dan diperparah dengan harga pakan mencapai Rp 6.000 per kilogram, peternak terpaksa menjual ayam kalingnya untuk menutupi biaya produksi.

Peternak di Sulsel Keluhkan Harga Pakan Melonjak Drastis

MAKASSAR (IM) - Peternak ayam di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluhkan harga pakan yang melonjak drastis. Sementara petani tidak menikmati kenaikan harga telur, meski sudah mulai naik di sejumlah pasar tradisional.

“Kenaikan harga jagung, dedak dan konsentrat sangat membebani peternak, sementara kenaikan harga jual telur di lapangan tidak dinikmati peternak,” kata Ketua Forum Peternak Layan Syahrial di Kota Makassar, Provinsi Sulsul, Kamis (23/9).

Dia mengatakan, apabila kondisi itu tidak segera dicari solusi, dikhawatirkan kondisi peternak semakin terpuruk pada masa pandemi Covid-19. Padahal, mereka sudah saatnya bangkit pada masa adaptasi normal baru. Sebagai gambaran, pergerakan kenaikan harga pakan yang terus meningkat mulai terjadi pada 2020 berkisar Rp 365 ribu per sak dengan berat 50 kilogram, kemudian pada Januari 2021 naik menjadi Rp 380 ribu per sak.

Pada Maret har menjadi Rp 410 ribu per sak, April Rp 425 per sak, sekarang sudah di atas Rp 445 per sak. Mengenai keluhan peternak yang umumnya berasal dari Kabupaten Maros, Gowa, Pangkep, Sidrap, Soppeng, Bulukumba, Enrekang, dan daerah lainnya, Layan mengaku, hal itu sudah disampaikan ke DPRD Provinsi Sulsel.

Hal tersebut dinilai penting, agar legislator selaku wakil rakyat mengetahui kondisi di lapangan dan diharapkan dapat membantu memperjuangkan peternak yang semakin terpuruk. Sementara produsen pakan ternak tidak menghiraukan kondisi lapangan.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel, Syaharuddin Alrif mengatakan, pihaknya sudah menerima aspirasi dari para peternak yang mengeluhkan kenaikan harga pakan. Pihaknya pun sudah memanggil produsen pakan ternak, distributor dan pihak terkait lainnya untuk duduk bersama mencari benang merah persoalan itu. ● **pra**

8 | Nusantara



ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA/HP

BANJIR DI MAMPANG DEPOK

Sejumlah kendaraan melintasi banjir di Kawasan Perempatan Mampang, Depok, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021). Warga setempat mengatakan banjir tersebut sering terjadi akibat sampah yang menumpuk seperti kasur, styrofoam, kayu, dan bambu di kali licin kolong jembatan jalan perempatan Mampang Depok.

APBD Cekak, Pemprov Jabar Tawarkan Jalan Tambang ke Investor

Diharapkan, tawaran menarik ini disambut baik calon investor, terutama pihak pengusaha tambang yang berusaha di Kecamatan Rumpin, Cigudeg, Parungpanjang dan kecamatan lainnya di Kabupaten Bogor.

RUMPIN (IM) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jabar sedang tertatih-tatih. Tapi, Pemprov Jabar tak kehilangan akal mencari jalan keluar jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor.

Mereka, melalui badan usaha milik daerah (BUMD) PT Jasa Sarana akan menawarkan investasi ke calon investor untuk pembangunan jalan khusus tambang.

“Rencananya proyek pem-

angunan jalan khusus tambang akan ditawarkan PT Jasa Sarana kepada para calon investor,” kata Kepala Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat Wilayah III, Iman Budiman, kepada wartawan di Bogor, Kamis (23/9).

Awalnya, sebut Iman Budiman, Pemprov Jabar berniat membiayai jalan tambang itu. Tapi, karena terjadi defisit dalam APBD atau alasan lain-

dari pihak swasta.

Pria asli Bandung ini menargetkan saat ini Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat sudah membuat rencana bisnis. Harapannya tawaran menarik ini disambut baik calon investor, terutama pihak pengusaha tambang yang ada di sekitar lokasi. Hitungan kami proyek ini selain menguntungkan juga menjadi solusi kemacetan lalu lintas masyarakat umum dan memiliki efek positif lainnya,” terangnya.

Iman menjelaskan dari segi finansial, adanya jalan khusus

tambang ini akan menambah keuntungan para pengusaha tambang.

Jika awalnya satu unit kendaraan tambang bisa satu kali mengangkut hasil tambangnya, dengan adanya jalan khusus ini bisa dua atau tiga kali pengangkutan.

“Jalan khusus tambang ini lebih pendek jalurnya karena hanya 10-12 km. Pasti menghemat biaya bahan bakar. Lalu juga tidak ada kemacetan panjang. Jadi, jika sebelumnya cuma bisa satu kali, dengan adanya jalan khusus tersebut, supir truk tambang bisa dua hingga tiga kali mengangkut hasil tambang. Pasti ada peningkatan pendapatan buat para pengusaha tambang,” jelas Iman.

Data yang dihimpun, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) pada Maret 2022 menandatangani proyek pembangunan Jalan Tol JORR 3 yang menghubungkan Sentul-Parung-Rumpin-Serpong,

hingga rencana tersebut disambut baik Pemprov Jawa Barat dengan menghubungkan jalan tol tersebut dengan jalan khusus tambang.

Jalan khusus tambang ini akan menghubungkan lokasi quarry di Kecamatan Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang dan kecamatan lainnya dengan pintu Tol JORR 3 yang ada di wilayah Rumpin. Pemkab Bogor saat ini juga sedang merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) demi mendukung rencana Pemrov Jawa Barat tersebut.

Pembangunan jalan khusus tambang ini merupakan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami masyarakat sekitar kawasan lokasi tambang atau quarry, seperti kemacetan lalu lintas, rusaknya infrastruktur jalan maupun jembatan dan juga timbulnya penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang diduga terdampak dari usaha tambang tersebut. ● **pur**

Bogor Waspadai Bencana Banjir Jelang Akhir Tahun

BOGOR (IM) - Kota Bogor akan segera menghadapi musim penghujan menjelang akhir tahun. Oleh karena itu, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diminta untuk bersiaga demi mengantisipasi terjadinya bencana.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto meminta, pemerintah di wilayah dan dinas terkait untuk memantau titik-titik rawan banjir. “Kita siaga 24 jam. Tapi yang penting saya ingatkan lagi, teman-teman di wilayah dan dinas untuk monitor titik-titik rawan banjir. Yaitu normalisasi dari saluran air dan sebagainya. Itu kita ingatkan terus menjelang akhir tahun,” ujar Bima Arya, kemarin.

Selain itu, dia juga meminta, untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk menyiapkan diri karena dikhawatirkan akan

terjadi bencana. Misalnya, di Kampung Bebek, Bogor Utara yang kerap terdampak banjir.

“Sistem bencana kita siaga. Dan tetap kepada warga karena ekstrem, di wilayah-wilayah yang rawan banjir, ketika banjir yang sebaiknya menyiapkan diri semuanya,” ucapnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto meminta, semua perangkat ada baik di daerah terutama di Kelurahan, kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan beberapa SKPD terkait perlu menyiapkan langkah-langkah yang preventif. Termasuk penyiagaan peralatan kebencanaan.

Atang juga meminta agar program-program pembanunan yang sudah dianggarkan wilayah dan yang berbasis penanganan kebencanaan segera dilakukan. “Mumpung masih ada waktu untuk persiapan.

Jangan sampai ada perasaan bahwa hari ini masih akhir September, masih ada waktu tiga bulan itu membuat kita tidak teres segera lakukan,” katanya.

Menurut Atang, jika langkah antisipasi dan penanganan tidak segera dilakukan, maka tagline ‘Bogor Berlari’ milik Kota Bogor tidak cocok untuk dilakukan. Sehingga, lebih baik jika Pemkot Bogor bersiap-siaga dan waspada. Agar tidak terjadi kejadian bencana yang dikhawatirkan.

“Karena tagline-nya Bogor Berlari sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, maka semua pihak harus berlari menyiapkan segala kemungkinan,” tuturnya.

“Walaupun kita tidak berharap ya. Ada hal-hal yang force major yang benar-benar terjadi. Mudah-mudahan tidak. Tapi bersiap-siaga dan waspada itu jauh lebih penting,” tegasnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

PROGRAM SEKOLAH UNTUK LANSIA DI BANDUNG

Pendamping berbincang dengan lansia saat pembukaan program sekolah untuk lansia di Kantor PMI Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/9). Sekolah lansia yang rencananya akan hadir di setiap kecamatan di Kota Bandung tersebut bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan terhadap perilaku psikologis serta kesehatan jasmani bagi masyarakat lanjut usia sebagai implementasi dari Indonesia Ramah Lansia.

Pemkot Bogor Apresiasi Perumda Pasar Pakuan dan RSUD Lulus Audit

BOGOR (IM) - Pemerintah Kota Bogor mengapresiasi keberhasilan Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya dan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor yang lulus audit dari Program Kolaborasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Holding BUMN Jasa Survei.

“Seluruh rangkaian bisnis yang ada di dua tempat ini paling tidak sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan selama masa pandemi maupun pascapandemi,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim dalam keterangan yang diperoleh di Kota Bogor, Kamis (23/9).

Perumda Pasar Pakuan Jaya meraih sertifikat berupa Surat Keterangan Audit Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (dikenal juga dengan istilah CHSE terdiri atas cleanliness, health, safety, and environmental sustainability) sedangkan RSUD Kota Bogor mendapat Surat Keterangan Audit Sistem Manajemen Keamanan dan Keselamatan Kerja (SMK3) berupa Certificate of Disinfection & Analysis.

Holding BUMN Jasa Survei terdiri atas PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero).

Beberapa waktu lalu tim dari holding BUMN Jasa Survei tersebut menyelenggarakan program bantuan berupa audit kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan serta bantuan Program Pemantauan Disinfeksi (Disinfection Monitoring Programme) untuk Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan bantuan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Sertifikasi SMK3 di RSUD Kota Bogor.

Penyerahan surat keterangan hasil audit tersebut telah

berlangsung di Kota Bogor, Rabu (22/9).

Menurut Wakil Wali Kota, dengan memegang sertifikat tersebut, Perumda Pasar Pakuan Jaya Bogor dan RSUD Kota Bogor sudah berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pasar akan menjamin kebersihan dan protokol kesehatan berbeda dengan kondisi sebelumnya yang dikenal kumuh, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman. Sementara RSUD Kota Bogor meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang telah didapatkan.

Muzakir mengatakan pihaknya akan meningkatkan penyempurnaan disinfektan sebagai prosedur baku untuk kebersihan dan keamanan masyarakat.

“Kesan sementara bahwa pasar merupakan tempat utama penyebaran Covid-19 tidak ada lagi.

Jadi dengan mendapatkan sertifikat ini menyatakan bahwa kita sudah memenuhi standar,” kata Muzakir.

Sementara Ilham Chaidir mengatakan sertifikasinya tersebut untuk melihat sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, yang ada di RSUD Kota Bogor, baik bagi dokter, karyawan, maupun pasien, dan pengunjung.

Sejumlah hal yang diaudit antara lain manajemen ketersediaan dan penggunaan oksigen dilihat dari tekanannya, pelayanan pada pasien, sistem evakuasi pasien dan fasilitas pemadam kebakaran di rumah sakit.

Apalagi, kata Ilham, RSUD Kota Bogor telah menjadi rumah sakit rujukan regional yang menampung pasien dari beberapa daerah terdekat dan jadi rumah sakit riset (research hospital).

“Kami juga sudah terakreditasi yang cukup tinggi untuk rumah sakit sebenarnya,” katanya. ● **gio**